



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 503 /B.07/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018, tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-11-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 502 /B.07/HK/2020
 TANGGAL: 6-11-2020

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1.306	1	0	A		
2	- SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1.069	1	0	A	2,1934	A
3	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1.025	1	0	A		
4	- Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	3	3.360	3	0	A		
5	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	3	3.353	3	0	A		
6	- Pengelola Kepegawaian	2	3.182	3	1	A		
7	- Pengadministrasi Umum	4	2.272	2	-2	A		
8	- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1	1.130	1	0	A		
9	- Bendahara	1	2.267	2	1	A		
10	- Analis Keuangan	2	2.824	3	1	A		
11	- Pengelola Keuangan	2	2.780	3	1	A		
12	- Pengadministrasi Keuangan	2	1.680	2	0	A		
13	- KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1	1.040	1	0	A		
14	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	2.419	2	0	A		
15	- Pengelola Bahan Perencanaan	1	2.640	3	2	A		
16	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	1.860	2	0	A		
17	- KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	1	1.470	1	0	A	1,7145	A
18	- KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PENYUSUNAN APBD	1	1.152	1	0	A		
19	- Analis Keuangan	2	3.147	3	1	A		
20	- Verifikator Anggaran	2	1.840	2	0	A		
21	- Pengadministrasi Keuangan	2	1.560	2	0	A		
22	- KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	1	1.323	1	0	A		
23	- Analis Keuangan	2	1.632	2	0	A		
24	- Verifikator Anggaran	3	1.840	2	-1	A		
25	- Pengadministrasi Keuangan	0	1.480	1	1	A		
26	- KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN	1	1.298	1	0	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIVITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	- Analis Keuangan	1	2.240	2	1	A		
28	- Verifikator Anggaran	2	2.080	2	0	A		
29	- Pengadministrasi Keuangan	1	1.227	1	0	A		
30	- KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	1	1.485	1	0	A	1,8607	A
31	- KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	1	1.389	1	0	A		
32	- Analis Keuangan	4	2.616	3	-1	A		
33	- Pengelola Keuangan	3	2.800	3	0	A		
34	- Pengadministrasi Keuangan	0	1.360	1	1	A		
35	- KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN PENGELUARAN KAS DAERAH	1	1.434	1	0	A		
36	- Analis Keuangan	4	2.400	2	-2	A		
37	- Pengelola Keuangan	2	1.840	2	0	A		
38	- Pengadministrasi Keuangan	2	1.520	2	0	A		
39	- KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PENGELOLAAN KAS	1	1.066	1	0	A		
40	- Analis Keuangan	4	2.184	2	-2	A		
41	- Pengelola Keuangan	2	2.336	2	0	A		
42	- Pengadministrasi Keuangan	1	1.760	2	1	A		
43	- KEPALA BIDANG AKUNTANSI	1	1.277	1	0	A	1,8282	A
44	- KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	1	1.057	1	0	A		
45	- Analis Keuangan	4	2.560	3	-1	A		
46	- Pengelola Keuangan	4	2.648	3	-1	A		
47	- Pengadministrasi Keuangan	1	1.680	2	1	A		
48	- KEPALA SUB BIDANG PENCATATAN PENDAPATAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	1	1.023	1	0	A		
49	- Analis Keuangan	3	2.816	3	0	A		
50	- Pengelola Keuangan	3	2.077	2	-1	A		
51	- Pengadministrasi Keuangan	0	1.328	1	1	A		
52	- KEPALA SUB BIDANG PENCATATAN NON APBD DAN PEMBINAAN PPK BLUD	1	1.310	1	0	A		
53	- Analis Keuangan	3	1.952	2	-1	A		
54	- Pengelola Keuangan	3	2.438	2	-1	A		
55	- Pengadministrasi Keuangan	1	1.600	2	1	A		
56	- KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA, DAN INVESTASI	1	1.229	1	0	A	1,9534	A
57	- KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN APBD KABUPATEN/KOTA	1	1.174	1	0	A		
58	- Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	3	2.808	3	0	A		
59	- Pengelola Keuangan	3	2.600	3	0	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	- Pengadministrasi Keuangan	0	1.320	1	1	A		
61	- KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1	1.094	1	0	A		
62	- Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	3	2.766	3	0	A		
63	- Pengelola Keuangan	2	2.308	2	0	A		
64	- Pengadministrasi Keuangan	0	1.440	1	1	A		
65	- KEPALA SUB BIDANG INVESTASI	1	1.461	1	0	A		
66	- Analis Investasi Pemerintah	4	2.800	3	-1	A		
67	- Pengelola Keuangan	3	2.794	3	0	A		
68	- Pengadministrasi Keuangan	2	1.600	2	0	A		
69	- KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH	1	1.480	1	0	A	2,5492	A
70	- KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN ASET DAERAH	1	1.392	1	0	A		
71	- Analis Standard Harga	4	3.520	4	0	A		
72	- Analis Perencanaan	3	3.160	3	0	A		
73	- Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	2.400	2	1	A		
74	- KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET DAERAH	1	1.386	1	0	A		
75	- Analis Berkas Sengketa	3	2.880	3	0	A		
76	- Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	2	3.480	3	1	A		
77	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	3.200	3	1	A		
78	- KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	1	0,961	1	0	B		
79	- Analis Laporan Neraca	2	3.040	3	1	A		
80	- Pengendali Teknologi Informasi	2	3.120	3	1	A		
81	- Pengolah Data Laporan Neraca	3	3.120	3	0	A		
82	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	0	1.381	1	1	A		
83	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	0	1.107	1	1	A		
84	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya	0	3.203	3	3	A		
85	- JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Utama	0	3.338	3	3	A		
86	- JF Analis Kebijakan	0	2.900	3	3	A		
87	- JF Analis Kebijakan	0	2.796	3	3	A		
88	- JF Analis Kebijakan	0	2.421	2	2	A		
89	- JF Analis Kebijakan	0	2.465	2	2	A		
90	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	2.771	3	3	A		
91	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	3.390	3	3	A		

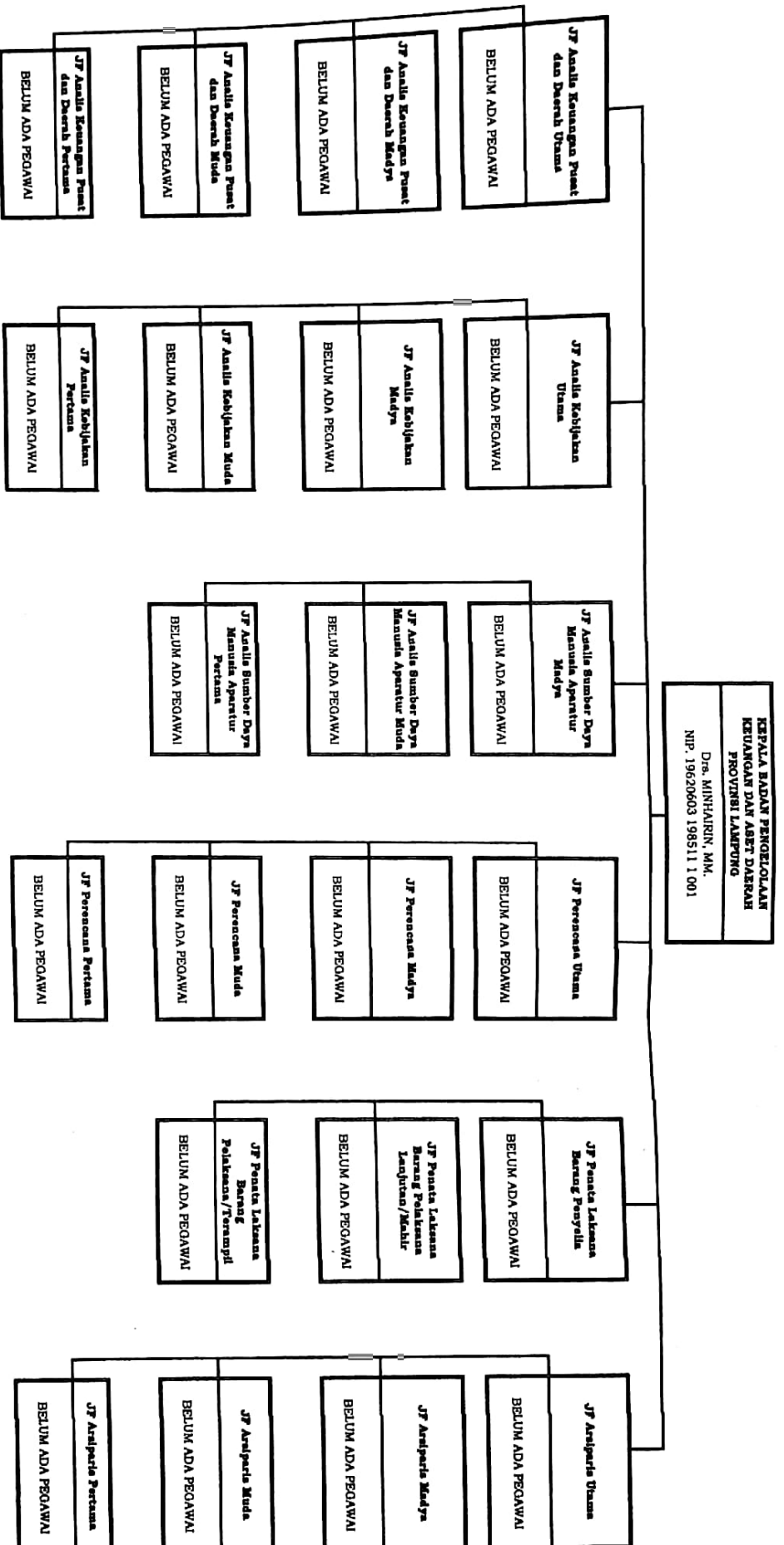
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	1.627	2	2	A		
93	- JF Perencana Pertama	0	2.837	3	3	A		
94	- JF Perencana Muda	0	3.390	3	3	A		
95	- JF Perencana Madya	0	2.380	2	2	A		
96	- JF Perencana Utama	0	2.176	2	2	A		
97	- JF Penata Laksana Barang	0	3.482	3	3	A		
98	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana	0	3.395	3	3	A		
99	- JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	3.370	3	3	A		
100	- JF Arsiparis Pertama	0	1.044	1	1	A		
101	- JF Arsiparis Muda	0	1.460	1	1	A		
102	- JF Arsiparis Madya	0	0.628	1	1	D		
103	- JF Arsiparis Utama	0	1.098	1	1	A		
JUMLAH		150	215,6431	206	56		2,0900	A

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

**PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]

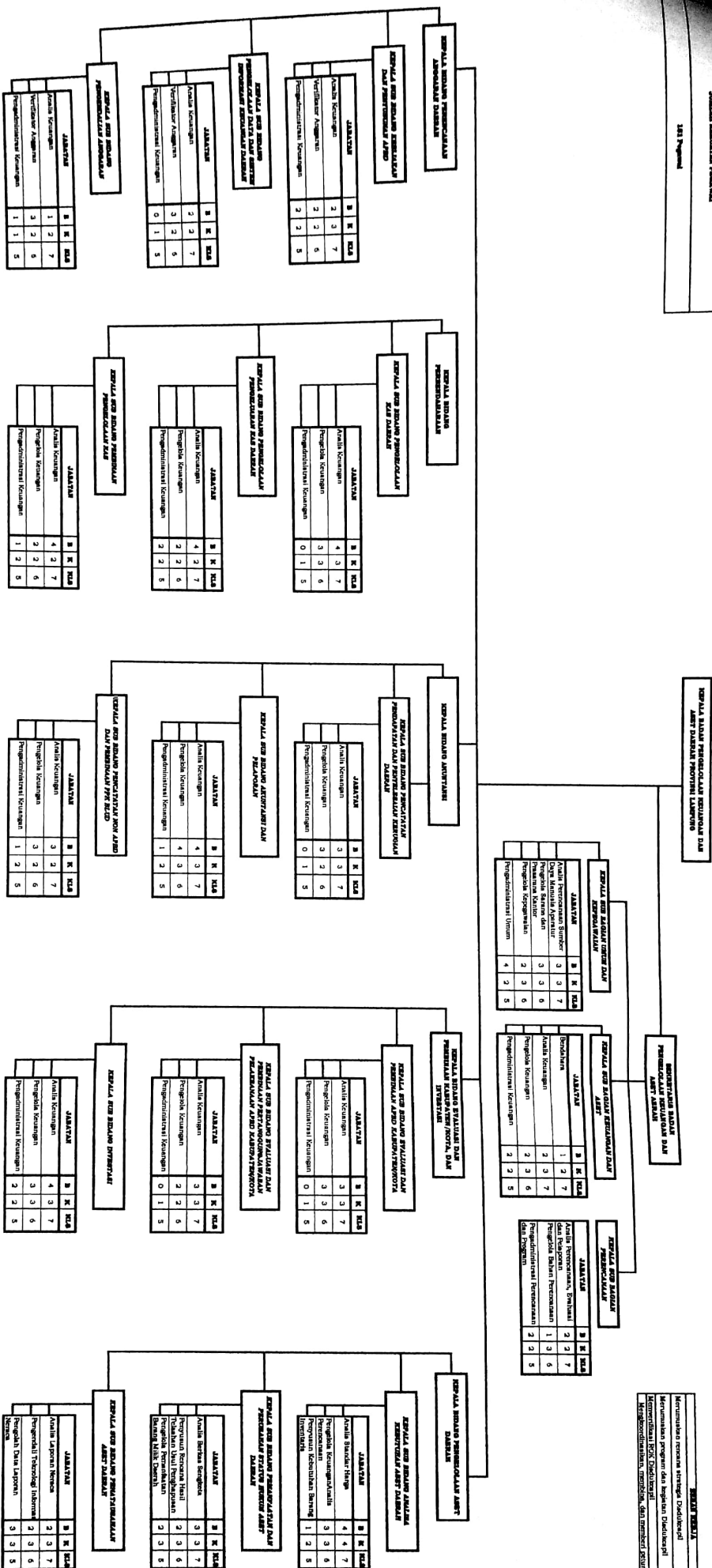
ARINAL DJUMADI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 0/ /B.07/HK/2020
TANGGAL: 2020

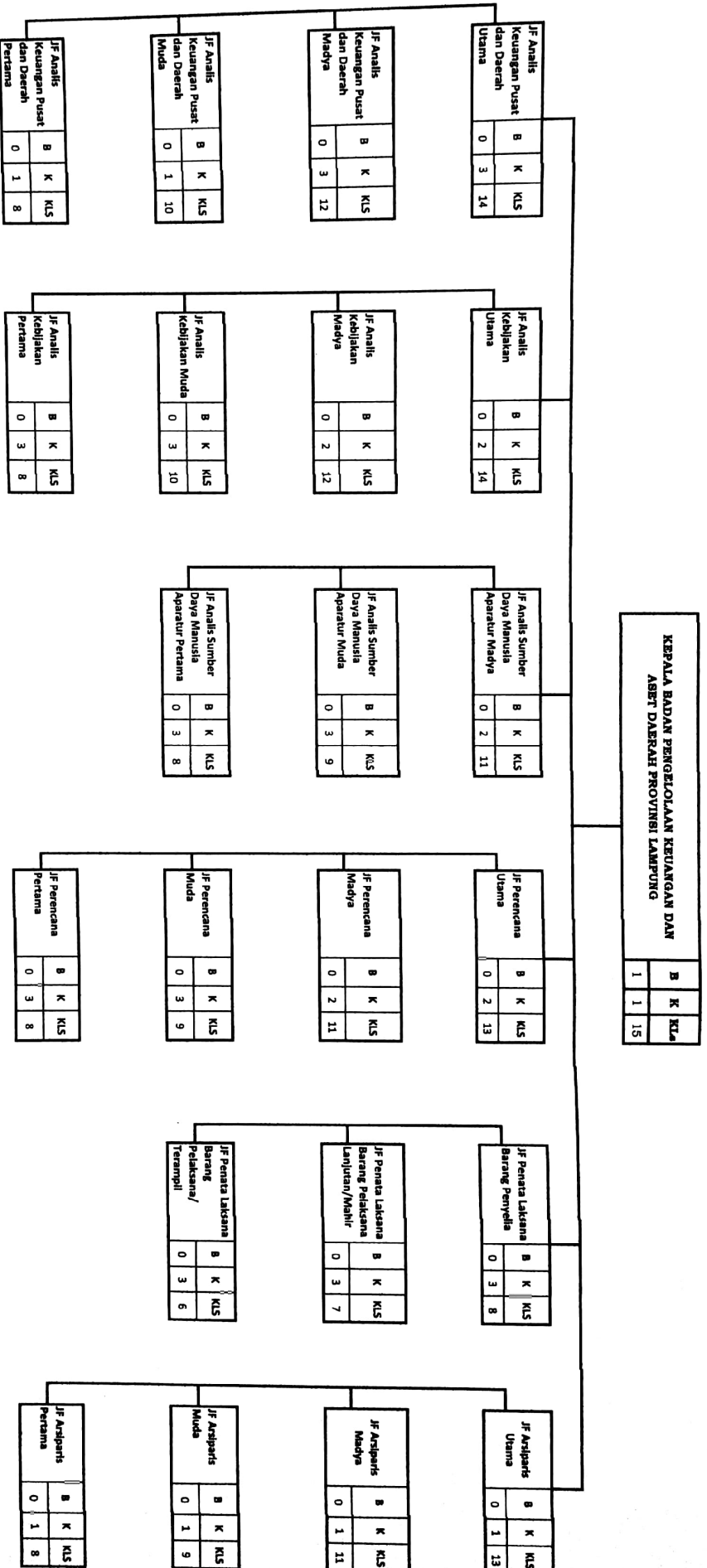
TANGGAL: 2020

2011 Program

PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PERTYUSUMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA/
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASST DAERAH PROVINSI LAMPUNG



**PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI